**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAP/1
NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh, dipandang perlu menata dan pengaturan kembali Pengelolaan. Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Qanun;

Mengingat :

1. Undang -undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956. Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 1103);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran;. Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

8. Undang-Undang Nomor 18 "Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 76);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TENTANG
PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2. Provinsi adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4. Pemerintah Provinsi adalah Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur peserta perangkat Daerah Otonom yang sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.
7. Kabupaten adalah Sagoe atau nama lain merupakan Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Bupati/Wali Sagoe atau nama lain.
8. Kota adalah Banda atau nama lain yang merupakan Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Walikota/wali Banda atau nama lain.
9. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Dinas Sumber Daya Air adalah Dinas Sumber Daya Air Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
11. Air bawah Tanah adalah sumber daya air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
12. Air Permukaan adalah semua air yang berasal dari sumber-sumber air yang terdapat di atas permukaan tanah tidak termasuk air laut, kecuali air laut yang dimanfaatkan di darat untuk berbagai keperluan.
13. Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Air permukaan adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan serta konservasi Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
14. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan Air Bawah Tanah dan Air permukaan untuk keperluan tertentu.
15. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi di mana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran, pelepasan air bawah tanah berlangsung.
16. Daerah Tangkapan Hujan adalah daerah presipitasi (air hujan) mengkonsentrasi ke sungai.
17. Eksplorasi Air Bawah Tanah adalah penyelidikan air bawah tanah detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama tentang sebaran dan karakteristik sumber air bawah tanah.
18. Penerapan dan pengambilan mata air adalah kegiatan pembenahan tempat keluarnya mata air sehingga memudahkan dalam pengambilan dan pemanfaatannya.
19. pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain.
20. pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan yang dilakukan dengan

cara membuat saluran, pompanisasi ataupun wadah dan bangunan air lainnya.

21. Konservasi Air Bawah Tanah dan Air permukaan adalah pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan Untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.

BAB II PENGUASAAN AIR PERMUKAAN DAN AIR BAWAITANAH

Pasal 2

- (1) Semua Air Permukaan dan Air Bawah Tanah yang terdapat dalam wilayah hukum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang merupakan kekayaan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa adalah milik Bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai oleh Negara yang didayagunakan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengelolannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (3) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bertindak sebagai fasilitator dalam menentukan kebijakan umum Pengelolaan Air Permukaan dan Air sebagaimana di maksud dalam ayat (1).
- (4) Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sesuai dengan Kewenangannya menjamin hak-hak dari pemegang izin dalam melakukan usaha di bidang Air Permukaan dan Air Bawah Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB III AZAS DAN LANDASAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah didasarkan atas azas-azas :
 - a. fungsi sosial dan nilai ekonomis;
 - b. kemanfaatan umum;
 - c. keterpaduan dan keserasian;
 - d. keseimbangan;
 - e. kelestarian;
 - f. kemandirian; dan
 - g. transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Teknis pengelolaan air untuk air bawah tanah berlandaskan pada satuan wilayah cekungan air bawah tanah dan untuk air permukaan berlandaskan pada satuan Daerah Pengaliran Sungai.

- (3) Hak Atas Air Permukaan dan Air Bawah Tanah adalah hak guna air.

BAB IV
KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR PERMUKAAN
DAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengelolaan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) meliputi :
- a. penetapan standar pengelolaan Air Permukaan dan Air Bawah tanah;
 - b. penetapan pedoman pemberi perizinan, pembinaan dan pengawasan;
 - c. penetapan pedoman dalam kegiatan survei, inventarisasi, pengeboran dan pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah;
 - d. penetapan kebijakan dalam pengambilan, pemanfaatan dan konservasi Air Permukaan dan Air Bawah Tanah;
 - e. penetapan tarif pajak; dan
 - f. pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di bidang Air Permukaan dan Air Bawah Tanah. (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB V
PERUNTUKAN AIR PERMUKAAN DAN AIR BAWAH TANAH

Pasal 5

- (1) Peruntukan pengambilan dan pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah untuk keperluan rakyat di segala bidang dengan memperhatikan Skala prioritas.
- (2) Urutan prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. air minum;
 - b. air rumah tangga;
 - c. pertahanan dan keamanan nasional;
 - d. peribadatan;
 - e. usaha perkotaan, misalnya : pencegahan kebakaran, penggelontora, menyiram tanaman, dan lain-lain;
 - f. pertanian, pertanian rakyat dan usaha pertanian lainnya;